

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi (IKMI) pada Daerah Irigasi Batanghari di Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 79,16 termasuk dalam kategori “Cukup” sehingga modernisasi irigasi ditunda, perlu dilakukan penyempurnaan 1-2 tahun secara menyeluruh.
- 2) Urutan prioritas dalam persiapan pelaksanaan modernisasi irigasi pada D.I. Batanghari ditentukan berdasarkan nilai bobot terendah yang diperoleh dari perhitungan IKMI, Adalah sebagai berikut:
  - a. Blanko O&P pada Pilar Sistem Pengelolaan Irigasi dengan nilai 0,50
  - b. P3A pada Pilar Institusi Pengelola Irigasi dengan nilai 0,86
  - c. Manual O&P pada Pilar Sistem Pengelolaan Irigasi dengan nilai 0,90
  - d. Kualitas pada sub kriteria Petani pada Pilar Sumber Daya Manusia dengan nilai 1,12
  - e. Komisi Irigasi pada Pilar Institusi Pengelola Irigasi dengan nilai 1,55
- 3) Penyusunan rekomendasi strategis untuk mendukung kesiapan pelaksanaan modernisasi irigasi pada D.I Batanghari berdasarkan urutan prioritas dari lima sub kriteria yang memiliki bobot terendah, rekomendasi yang dapat disusun diantaranya sebagai berikut:
  - a. Blanko O&P  
Penerapan Blanko O&P perlu dimaksimalkan dengan menerapkan pengisian blanko secara digitalisasi melalui aplikasi SMOPI, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
  - b. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)  
Diperlukan pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) agar mampu terlibat aktif dalam pengelolaan jaringan tersier dan mendukung pelaksanaan modernisasi irigasi dari sisi kelembagaan pengguna air di tingkat lapangan.

c. Manual O&P

Perlu dilakukan pembaharuan manual Operasi dan Pemeliharaan yang disesuaikan dengan kondisi terkini serta diterapkan secara menyeluruh oleh petugas di lapangan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan O&P berjalan sesuai standar dan dapat mendukung prinsip efisiensi serta efektivitas pengelolaan irigasi.

d. Kualitas Petani

Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan pengetahuan petani melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan teknis. Hal ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pembinaan serta pemberdayaan P3A yang hingga saat ini masih belum terlaksana secara optimal.

e. Komisi Irigasi

Percepatan pembentukan komisi irigasi Batanghari melalui SK Bupati sebagai dasar hukum dan operasional lembaga tersebut. Inisiasi ini harus difasilitasi oleh Balai Wilayah Sungai (BWS Sumatera V Padang dan BWS Sumatera VI Jambi) yang memegang wewenang tertinggi dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi D.I. Batanghari. Pembentukan komisi irigasi dengan melibatkan wakil petani, Dinas PU, Dinas Pertanian, dan stakeholder atau pemanfaat air irigasi lainnya yang menggunakan air irigasi sebagai sumber utama kegiatannya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai masukan antara lain sebagai berikut:

- a. D.I. Batanghari merupakan daerah irigasi lintas provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Penelitian ini hanya terbatas pada Daerah Irigasi Batanghari yang berada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperluas cakupan wilayah penelitian hingga Daerah Irigasi Batanghari

yang berada di Kabupaten Bungo dan Tebo Provinsi Jambi agar mendapatkan gambaran kesiapan modernisasi irigasi yang lebih komprehensif.

- b. Pemerintah pusat dan daerah dapat mempertimbangkan hasil analisis dan rekomendasi strategi dari penelitian ini sebagai dasar dalam penyusunan program modernisasi irigasi pada D.I. Batanghari yang terarah.

